


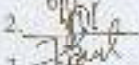
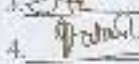
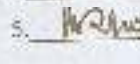

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEDAN - INDONESIA

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1)  
Terskreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No.4402/SK/BAN-PT/Ak-  
PNE/S/VII/2022. Menyatakan Bahwa :

Nama : Dian Veronika Sinaga  
NPM : 20230039  
Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Dan Lisan Kecapahensif Sarjana Ilmu  
Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1).  
Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Dinyatakan LULUS.

1. Ketua : Dr. Dra. Johnson Pasaribu, MSi
2. Sekretaris : Dra. L. Primawati Dugodora, MSP
3. Penguji Utama : Janson Rajagukguk, S.Sos,SE,MAP
4. Anggota Penguji : Dra. Nuzlia E.T. Sihombing, MSi
5. Pembaca : Prof.Dr. Des. Marlan Hutahaean, MSi

1.   
2.   
3.   
4.   
5. 

Diketahui

Dekan



Dr. Dian Veronika Sinaga, MM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini mengangkat tema mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Titi Papan apakah sudah berjalan dengan efektif.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan kartu identitas anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat kartu identitas anak sangat besar untuk memenuhi hak anak dan dapat digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di Bank. Kartu identitas anak juga berlaku untuk proses pendaftaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial serta mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian.

Namun, berbagai perspektif masyarakat dan respons masyarakat telah muncul sejak program diluncurkan atau digunakan. Sebagian masyarakat menganggap program itu tidak penting. Ada orang yang tidak percaya bahwa kartu tersebut harus digunakan karena tidak ada alasan yang kuat. Sekilas persoalan ini tidak begitu mendesak, karena Kartu Identitas Anak tidak mempengaruhi pelaksanaan undang-undang pemerintah dan tidak ada sanksi pidana atau

administratif yang berat terhadap orang tua dari anak yang tidak melengkapi Kartu Identita Anak tersebut. Ada banyak pandangan yang berbeda di masyarakat yang meragukan kebutuhan dan manfaat KIA. Beberapa alasan untuk pandangan ini termasuk tidak memahami tujuan dan manfaat KIA, percaya bahwa KIA tidak memberikan manfaat yang signifikan, dan tidak mengetahui hak-hak dan perlindungan yang diperoleh anak melalui penerapan kartu identitas anak

Kartu identitas anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten/Kota. Dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0 - 5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini ternyata

berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak walaupun anak tersebut telah memiliki Akta kelahiran, namun Akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang. Fungsi KIA untuk kedua kelompok usia ini sebenarnya sama, hanya saja isi yang terdapat di kartu memiliki sedikit perbedaan. KIA untuk anak usia 0-5 tahun tidak menampilkan foto, tetapi KIA untuk usia 5-7 tahun memakai foto layaknya KTP. Bedanya KIA dengan KTP adalah tidak terdapatnya chip elektronik pada KIA. Nanti ketika anak berulang tahun yang ke- 17 tahun, KIA akan secara otomatis diubah menjadi KTP.

Penerapan program Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan secara bertahap di seluruh Indonesia. Pada tahun pertama pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mana pada tahun 2016 pemerintah hanya melaksanakannya di 50 kabupaten atau kota. Program Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut pada akhirnya berlanjut hingga tahun 2024 dengan tujuan dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh kabupaten atau kota. Jika KIA dilaksanakan di setiap provinsi di Indonesia yang berjumlah tiga puluh empat (38) provinsi, maka seluruh provinsi wajib melaksanakan program KIA, dimana penentuan kabupaten dan kota yang akan melaksanakannya didasarkan pada pandangan pemerintah provinsi masing-masing. Salah satu kota tersebut adalah Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan terus menyalurkan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Medan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Medan, per Juni 2022 terdapat 258.175 anak yang membuat KIA dari jumlah total jumlah anak di kota Medan sebanyak 671.676 anak.

Salah satu kelurahan di kota Medan yang dapat melakukan permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan yaitu Kelurahan Titi Papan. Kelurahan Titi Papan merupakan salah satu daerah yang terletak pada kecamatan Medan Deli kota Medan . Berdasarkan data informasi pemerintah Kota Medan jumlah warga Titi Papan terdiri dari 26.428 jiwa.

Berdasarkan dari paparan diatas, Peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut di Kelurahan Titi Papan yaitu untuk mengetahui bagaimana program KIA berjalan dan berpengaruh di kelurahan tersebut. Tujuan utama Program ini ialah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai Upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara. Penelitian ini menjadi penting karena KIA merupakan upaya implementasi hak atas identitas anak, yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan memudahkan proses administrasi kependudukan. Penelitian juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KIA, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta menjelaskan bagaimana efektivitas dari implementasi tersebut. Alasan lainnya penulis memilih lokasi penelitian di Kelurahan Titi Papan yaitu karena berdasarkan data dari pemerintah Kota Medan, Kelurahan Titi Papan merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota medan. Oleh karena itu penulis, Mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja implementasi program Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis, Penelitian ini dapat menambah wawasan, Pengetahuan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik dalam dimensi Kebijakan. Serta dapat menjadi bahan evaluasi kepada peneliti dan dapat dijadikan sebagai referensi pengkajian masalah Implementasi Program Kartu Identitas Anak.

#### **b. Secara Praktis**

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar mengenai Kartu Identitas Anak serta faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Telaah Teori**

##### **2.1.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar suatu rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain-lain) untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditargetkan. Pengertian dari kebijakan tidak dapat terlepas dari suatu keputusan yang dibuat atau diciptakan pemerintah. Sedangkan pengertian dari publik yaitu aspek yang tidak dapat terlepas dari pemerintah, masyarakat, dan umum.

Secara etimologis menurut Angga (dalam Dunn, 2003: 51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Selanjutnya Nugroho (2011) merumuskan definisi kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian dari kebijakan publik di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dirumuskan dan dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya untuk memecahkan masalah yang tumbuh di masyarakat. Kebijakan publik yang dibuat oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah mempertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhi keputusan, hal tersebut adalah responsiveness dan effectiveness dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Dunn (2003:24) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah:

1. Tahap Penyusunan

Agenda Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak



mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para actor mengenai arah tindakan yang telah ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn (1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

## 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

## 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

## 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public telah meraih dampak yang diinginkan.

### **Bentuk Bentuk Kebijakan Publik**

Pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas beberapa bentuk yaitu :

1. *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang

2. *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin;
3. *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu; dan
4. *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara

### **2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier (1983:61) merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan pengadilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut uraian di atas, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal

tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "wisdom".

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam sebuah lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan juga kesempatan-kesempatan pada sebuah kebijakan yang diusulkan agar bisa menggunakan serta mengatasi serta mencapai sebuah tujuan ataupun mewujudkan suatu target maupun maksud tertentu.

Implementasi kebijakan adalah bagian dari cara penerapan sebuah kebijakan yang sudah dijalankan. Implementasi dipandang sebagai makna pelaksanaan undang-undang dengan kerja sama dari berbagai pihak agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi yaitu (1) pembuatan kebijakan (*the center*), (2) pejabat-pejabat pelaksana lapangan (*the periphery*), dan (3) aktor-aktor perorangan di luar badan pemerintah, yaitu kelompok sasaran (*target group*).

Implementasi kebijakan dari sudut pandang pembuat kebijakan berdasarkan pada usaha dari pejabat dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat untuk mendapat kepuasan dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat daerah agar memberikan pelayanan dan mengubah perilaku di masyarakat. Jika program tidak berjalan, pejabat atau lembaga pusat dapat

memberikan sanksi hukum kepada pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab, atau dapat menimbang serta merumuskan kembali kebijakan tersebut.

Dari sudut pandang pejabat pelaksana lapangan, implementasi berdasarkan perilaku pejabat dan instansi pelaku kebijakan agar dapat menyukseskan kebijakan dan menanggulangi masalah yang terjadi. Sedangkan dari sudut pandang kelompok sasaran, implementasi terjadi jika pada kelompok sasaran langsung merasakan dampak dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu tokoh yang mendefinisikan dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan yaitu George Edwards III. Sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2016:156), menurut George Edwards III implementasi kebijakan merupakan bagian dari tahap kebijakan publik, yaitu bagaimana pengaruh dan dampak untuk masyarakat.

Kebijakan dapat gagal jika tidak tepat sasaran, walaupun kebijakan sudah dijalankan. Jika kebijakan sudah dirumuskan dan direncanakan dengan baik, kegagalan masih dapat terjadi jika impleme mengimplementasikan sebuah kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan, sehingga dapat menyukseskan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan.

Untuk dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang berhasil dan mengetahui hambatan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, George Edwards III dalam Budi Winarno (2016:156-182) memberikan empat faktor atau variabel untuk menjelaskannya:

1. Comunication/komunikasi,

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang

akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77).

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka Dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Resources/sumber daya

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

### 3. Disposition/disposisi,

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana).

Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

### 4. Bureaucratic Structure/struktur birokrasi.

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering tetap berlaku karena inersia birokrasi.

Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating procedures (SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (Fragmentation) atas kebijakan yang ditetapkan.



Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor Bureaucratic structure yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

### **2.1.3. Kinerja Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif, maka Keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktifitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah sari suatu kebijakan yang meliputi Upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, dan implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Dalam kontek kebijakan, kinerja kebijakan adalah gambaran mengenai Tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan kebijakan baik berupa luaran kebijakan (policy output) maupun hasil kebijakan (policy outcome). Dalam kaitan dengan implementasi maka kinerja implementasi kebijakan hakekatnya adalah kegagalan atau keberhasilan implementasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah digariskan.

Cole dan Parston 2006:21) menjelaskan bahwa untuk dapat menentukan tinggi rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan maka penilaian kinerja (performance measurement) merupakan sesuatu yang penting. Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi

kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta disposisi implementator.

- Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- Sumber daya, baik sumberdaya manusia maupun non manusia, diperlukan untuk dukungan implementasi kebijakan.
- Hubungan antar organisasi juga pneting dalam koordinasi dan Kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- Karakteristik agen pelaksana, seperti struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, mempengaruhi implementasi suatu program.
- Kondisi sosial, politik, dan ekonomi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti sumberdaya ekonomi, linhkungan, dukungan kelompok kepentingan, dan sifat opini publik.
- Disposisi implementator mencakup tiga hal yang penting, yakni tindakan seberapa jauh yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan, serta kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi secara tepat.

#### **2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal(pusat) kepada pemerintahan daerah. Keberhasilan.

## 2. Organisasi

Organisasi pengimplementasian kebijakan memiliki peran strategis dalam proses implementasi. Organisasi bertanggung jawab terhadap *delivery mechanism process*, yaitu bagaimana *policy output* dapat mencapai kelompok sasaran. Jika organisasi yang diberikan tugas mengimplementasikan kebijakan tidak efektif maka konsekuensinya implementasi akan gagal dilaksanakan.

## 3. Lingkungan

Bahwa implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan (konteks) dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan nasional sangat ditentukan oleh lingkungan pemerintah daerah sebagai lokus kebijakan tersebut diimplementasikan. Grindle dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel lingkungan sangat berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, khususnya pada negara-negara berkembang yang menjadi objek risetnya. Cheema, Shabbir dan Rondinelli dalam buku, "Policy Implementation in Developing Countries (1983)" menyatakan bahwa variabel lingkungan seperti system politik sangat mempengaruhi berjalan tidaknya desentralisasi pada suatu negara.

## 4. Target Group

Target group atau kelompok sasaran merupakan variabel yang sering terlupakan. Studi implementasi yang lebih demokratis menganjurkan perlunya memperhatikan peran kelompok sasaran ini sejak awal, mulai dari agenda setting sampai implementasi.

### **2.1.5. Hak Warga Negara**

Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain.

Menurut Srijanti, Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan individu, serta menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Hak adalah sesuatu yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh warga negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang, dimana hal tersebut juga dipertegas oleh Notonegoro. Menurutnya, hak adalah sesuatu yang bersifat mutlak dimiliki dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan apapun termasuk pemerintah tidak dapat mengambil hak atau mengambil hak itu dari setiap individu. Hak yang diberikan kepada seseorang tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada orang lain. Itulah sebabnya setiap orang mendapat hak yang berbeda sesuai dengan bagiannya. Hak yang dimiliki manusia dilindungi dan dijamin oleh suatu negara, dengan demikian disebut hak-hak manusia sebagai kenyataan secara politis oleh warga negara. Hak inilah yang menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **Jenis-Jenis Hak**

1. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus adalah hak yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena fungsi tertentu, tetapi semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Hak ini dimiliki semua orang tanpa terkecuali.

## 2. Hak Positif dan Hak Negatif

Suatu hak dikatakan bersifat positif jika seseorang berhak untuk berbuat sesuatu untuk orang lain. Dikatakan hak negatif jika seseorang berbuat dan orang lain tidak menghindari untuk hal itu.

## 3. Hak Individual dan Hak Sosial

Hak individual adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki. Sementara hak sosial adalah hak yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan terhadap negara, tetapi juga berkaitan dengan anggota masyarakat.

## 4. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dan hak moral adalah hak yang bersifat solidaritas atau hak individu.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

## Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kartu Identitas

Anak ini sudah pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian -penelitian terdahulu, baik tujuan, Teknik pengumpulan data dan lain sebagainya. Berikut dijelaskan pada dibawah ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1	Lara Nadia Sari (2021)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Pasaman	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman belum terealisasi dengan baik. Dilihat dari indikator standar dan sasaran kebijakan bahwa masing-masing implementor sudah melaksanakan kebijakan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Terkait sasaran kebijakan masih belum tepat sasaran, karena dilihat kebijakan (KIA) yang masih belum begitu diketahui oleh masyarakat serta masih kurangnya kesadaran masyarakat bagi masyarakat yang telah mengetahui tentang kebijakan KIA ini untuk melakukan pengurusan.
2	Suriyana Razak,	Implementasi Kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Syamsiar, Sitti Aminah (2022)	Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang pembuatan kartu identitas anak (KIA) di kecamatan Wajo	(i) Implementasi pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembuatan KIA di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo melalui beberapa tahap yaitu sosialisasi, pendataan jumlah anak yang berhak mendapatkan KIA dan pembuatan KIA, (ii) factor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasia Kebijakan Pembuatan KIA di Kecamatan Sabbangparu dilihat melalui variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.
3	Windi Dwi Arista(2019)	Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.
4	Mohammad Risqi Haji Ega Firnanda	Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari implementasi Kebijakan KIA yang di berlakukan oleh Dispendukcapil telah sesuai dengan teori yang diterapkan untuk penelitian ini, yaitu teori George C.Edward III dimana terdapat empat indikator yang

			<p>digunakan sebagai bahan acuan penelitian berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan KIA di dispendukcapil berdasarkan keempat indikator telah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya mengikuti SOP dan Undang-undang yang mengatur KIA. Peneliti menemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai bahan penilaian agar suatu kebijakan dapat lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan</p>
5	<p>Anggia Delta Utama, Hendrik Koeswara, Mohammad Ichsan Kabbul(2023)</p>	<p>Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.</p>	<p>Berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Impelementasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sudah terlaksana namun belum optimal. Dalam pelaksanaan Progam Kartu Identitas Anak di Dharmasraya masih terdapat kendala berupa belum adanya struktur program yang jelas antarorganisasi pelaksana sehingga menyebabkan komunikasi serta koordinasi yang terjalin tidak efektif karena tidak adanya pembagian tugas dan peran yang jelas antar instansi</p>



			yang terlibat. Kemudian pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta pemahaman masyarakat mengenai program Kartu Identitas Anak yang belum baik berdampak pada pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Dharmasraya.
--	--	--	--

Dari kelima penelitian diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak ini sudah terlaksana dengan cukup baik,dapat dilihat dari persentasi kepemilikan buku KIA ini, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas apa manfaat dari KIA ini. Sebagian masyarakat menganggap bahwa KIA ini hanya sekedar pemenuhan hak konstitusi saja. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada focus penelitian, dimana penelitian ini akan focus kepada Upaya pemerintah terkait dalam meningkatkan kepemilikan Buku KIA dan Upaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan manfaat dari Buku KIA.

### **2.3. Keaslian dan Posisi Penelitian**

Penelitian tentang implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah topik yang luas dan telah banyak diteliti sebelumnya. Namun untuk membuat penelitian yang memiliki keaslian dan posisi penelitian berikut tinjauan Literatur yang cukup untuk memperhatikan penelitian terbaru tentang Kartu Identitas Anak (KIA):

1. (Nidia Rismania Dewi 2020) tentang Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa kebijakan Implementasi KIA ini dirasa masih kurang karena banyak sekali warga Tasikmalaya khususnya kota Tasikmalaya tidak banyak yang mengetahui apa itu Kartu Identitas Anak (KIA) dan manfaat KIA itu sendiri.

2. (Arsyilia Zhahral dan Lukman Arif 2024), menyebutkan bahwa implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya sudah cukup baik, namun masih banyak kelebihan dan kekurangan dari segi komunikasi dan sumber daya, pelaksanaan dan struktur birokrasi. Kedua, fasilitas dan kerja sama dengan pihak ketiga menjadi faktor pendukung penerapan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya. Di sisi lain, faktor penghambatnya ialah pada sektor masyarakat.
3. (Megawati, Bakhtiar, dan Muh. Sudirman 2023) menyebutkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang syarat dan prosedur, namun capaiannya belum mencapai target 120.294 anak yang berhak mendapatkan KIA pada akhir tahun 2021. Jumlah anak yang sudah mendapatkan KIA sebanyak 57.628 atau 48,00%, sedangkan yang belum memiliki KIA mencapai yakni 62.666 atau 52,00% dari total 120.294 anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Jeneponto adalah: a. Faktor Pendukung: 1) kegiatan sosialisasi dan jemput bola; 2) Faktor sarana dan prasarana. b. Faktor penghambat: 1) kesadaran Masyarakat; 2) Pandemi Covid-19; dan 3) Faktor peraturan tentang KIA .
4. (Lilis Wahyuni 2022) menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah berjalan pada tahun 2017 dengan baik sesuai prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang berlaku, sudah melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, proses penerbitan yang cepat, dan tidak dipungut biaya namun pada pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan.

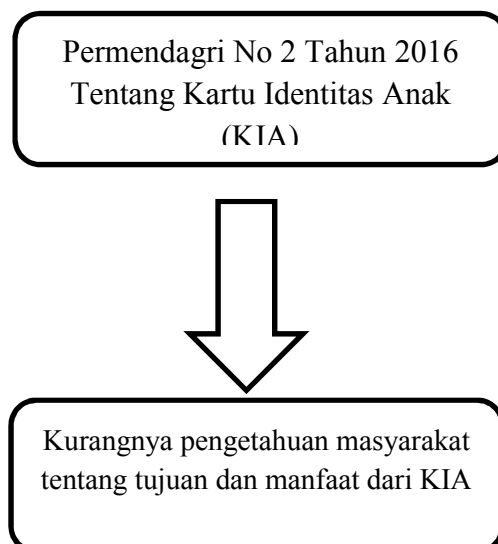
Posisi dan keaslian penelitian saya yaitu, Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli. Dengan mengkaji kinerja implementasi pada KIA serta faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi KIA. dengan menggunakan model implementasi menurut George C. Edward III

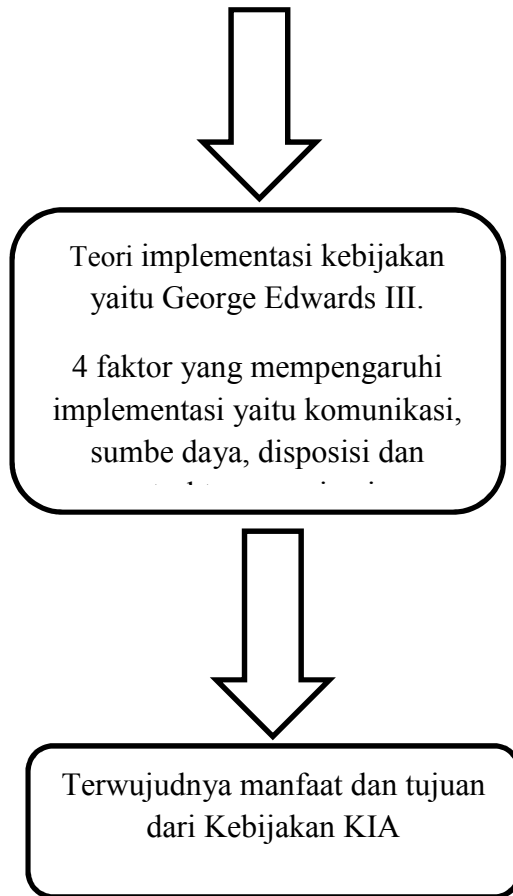
#### **2.4. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:

Desain penelitian ini didasari oleh adanya fenomena berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari Kartu Identitas Anak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi dari Teori implementasi kebijakan yaitu George Edwards III. George Edwards III mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumbe daya, disposisi dan struktur organisasi. Dan teori ini sesuai dengan permasalahan yang di sedang peneliti teliti.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Titi Papan

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapya , metode kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari lebih jauh tentang makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedalaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian adalah dilaksanakan mulai Maret 2024 – Juli 2024

### **3.3 Informan Penelitian**

Penyediaan informasi penelitian adalah subjek atau orang yang mengetahui informasi tentang objek penelitian dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Darinya diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya, baik berupa pernyataan, informasi atau data yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Irwan, SSTP., MSP selaku Lurah di kelurahan Titi Papan.
- b. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak T. Ahmad Irsan, S.Sos, selaku pegawai dibidang pengadministrasi Pemerintahan.
- c. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah orang tua yang wajib mengurus Kartu Identitas Anak.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Adapun Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain:

### **1. Data Primer**

Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan dengan berhadapan langsung dengan partisipasi, atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara seperti ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur, yang dimaksudkan untuk memungkinkan para partisipan untuk menyuarakan pendapat mereka (Creswell John.w, 2015:225). Teknik yang digunakan untuk memperoleh Data Primer adalah:

#### **a. Wawancara**

Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan mengumpulkan keterangan atau data mengenai objek. Wawancara mendalam bersifat terbuka dan tidak terstruktur serta tidak formal. Sifat terbuka dan terstruktur ini adalah maksudnya pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tidak bersifat kaku, namun bisa mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan dan ini hanya digunakan sebagai guidance. Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan dengan berhadapan langsung dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam focus group interview. Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur yang dirancang memunculkan pandangan dan opini dari partisipan. (Creswell, 2015:225)

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam kebijakan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Titi Papan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah :

a. dokumentasi

Selama penelitian, Peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti (diary atau buku harian, surat, e-mail) (Creswell John.w, 2015:228-229).

### **3.5 Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian Kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (Creswell John.w, 2015:253).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Langkahlangkah sebagai berikut:

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam Langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan scanning materi, menulis data serta memilah dan Menyusun



data tersebut ke dalam jenis- jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generalense atas informasi yang diperoleh dan mereflesikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. Coding data merupakan proses pengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam Langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis. Dalam hal ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan Kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.

Gambar 3.1 teknik Analisa data

